

BIG KEMBALI TERBITKAN SURAT REKOMENDASI PERPETAAN RDTR KABUPATEN TANGERANG DAN RTRW PROVINSI BANTEN



Sidang Pleno RTRW Provinsi Banten & RDTR Kab Tangerang

Jum'at, 11 Agustus 2017 menjadi hari yang bersejarah bagi provinsi paling barat di Pulau Jawa yaitu Banten. Bagaimana tidak, pada hari tersebut Provinsi Banten memperoleh surat rekomendasi perpetaan untuk Revisi RTRW Provinsi dan juga surat rekomendasi perpetaan untuk pembuatan peta RDTR di BWP Kelapa Dua dan BWP Curug di Kabupaten Tangerang.

Peta RTRW Provinsi serta dua BWP untuk RDTR ini telah melewati proses standar untuk asistensi yaitu pemeriksaan sumber data, peta dasar, peta tematik, peta rencana, dan album peta. Hingga hari rapat pleno dilaksanakan, masih dilakukan uji petik oleh pimpinan rapat Bapak Dr. Ir. Mulyanto Darmawan, M.Sc yang juga disaksikan oleh Kepala Bappeda Provinsi Banten, Hudaya Latuconsina, dan Kepala Bidang Bangunan pada Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang, Ir. Indra Suhardiman.

Sebelum masuk pada tahap pleno perpetaan di BIG, RTRW Provinsi sudah melewati pembahasan terkait kawasan hutan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta konsistensinya dengan substansi tata ruang yang juga dihadiri oleh tim dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. RTRW Provinsi ini diharapkan menjadi acuan ataupun *guidance* bagi kabupaten/kota di Provinsi Banten yang pada saat ini sedang melaksanakan proses revisi. [Chintia Dewi, 2017]

PROGRES ASISTENSI & SUPERVISI PETA TATA RUANG

PROSES REKOMENDASI TATA RUANG TAHUN 2017

Provinsi	Kabupaten	RDTR	Tanggal Rekomendasi
Jawa Timur	Bondowoso	Bondowoso	2017-01-12
		Jambesari	2017-01-12
		Maesan	2017-01-12
		Tamanan	2017-01-12
NTB	Lombok Barat	Gerung	2017-02-21
		Boyolangu	2017-03-20
Jawa Timur	Tulungagung	Gondang	2017-03-20
		Kauman	2017-03-20
		Pagerwojo	2017-03-20
		Nguntun	2017-03-21
		Rejotangan	2017-03-21
		Sendang	2017-03-21
Sulawesi Selatan	Sidenreng Rappang	Pangkajene dan Uluale	2017-04-05
		Semin	2017-04-13
DIY	Gunungkidul	Semin	2017-04-13
		Bloro	2017-04-20
Jawa Tengah	Banjarnegara	Cepu dan Blora	2017-04-27
		Karangkojar	2017-04-27
Papua	Intan Jaya	Perkotaan Sugapa	2017-05-02
Jawa Timur	Sampang	Perkotaan Sampang	2017-05-03
Banten	Tangerang	Curug dan Kelapa Dua	2017-08-11
Jawa Timur	Ngawi	Pitu dan Ngawi	2017-08-16

Provinsi	RTRW Kab/Kota	Tanggal Rekomendasi
Jawa Barat	Cirebon	2017-04-24
Sulawesi Tenggara	Konawe Kepulauan	2017-06-20
Nusa Tenggara Barat	Lombok Utara	2017-06-21
Sulawesi Tenggara	Kolaka Timur	2017-07-31
Kalimantan Timur	Kota Bontang	2017-08-11
Lampung	Pesisir Barat	2017-08-18

Provinsi	KSP	Tanggal Rekomendasi
Sulawesi Selatan	Pusat Bisnis Terpadu	2017-05-03
Gorontalo	Danau Limboto	2017-06-16

Provinsi	RTRWP	Tanggal Rekomendasi
Jawa Tengah	Jawa Tengah	2017-05-30
Banten	Banten	2017-08-11



Sidang Pleno Penyusunan Peta RTRW Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara Bersama Wakil Bupati, Kepala Dinas, dan Anggota Dewan



Sidang Pleno Penyusunan Peta RTRW Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur Bersama Kepala Dinas dan Anggota Dewan

Berita Seputar Sidang Pleno

BIG NYATAKAN DUA BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN KABUPATEN NGAWI PENUHI STANDAR PERPETAAN

Ngawi merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Jawa Timur. Secara geografis, kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Grobogan, Blora, Bojonegoro, Madiun, Magetan, Karanganyar, dan Sragen. Pada tahun 2016, Ngawi memulai penyusunan RDTR yaitu di Perkotaan Ngawi dan BWP Pitu. Penyusunan RDTR tersebut secara intensif dimulai pada bulan Agustus 2016. Dimulai dengan pengukuran GCP dan ICP pada bulan Agustus yang dilanjutkan lewat asistensi ke BIG pada bulan September 2016.

Pemeriksaan dilakukan secara intensif, dimulai dari proses pemeriksaan sumber data, peta dasar, peta tematik, peta rencana hingga album peta. Sebagai catatan, karakteristik dari perencanaan BWP ini cukup berbeda. Ir. Hadi Suroso, ST selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi menjelaskan bahwa BWP Pitu lebih diarahkan untuk pembangunan industri sedangkan untuk BWP Ngawi lebih diarahkan untuk pemukiman dan pertanian. Arahan tersebut juga merupakan hasil analisis oleh tim perencana berdasarkan karakteristik fisik dan sosial wilayah. Setelah menyelesaikan BWP Ngawi dan BWP Pitu, Kabupaten Ngawi juga akan mengajukan permohonan asistensi terhadap BWP lainnya. [Chintia Dewi, 2017]



Sidang Pleno RDTR Perkotaan Ngawi & BWP Pitu



Penyerahan Surat Rekomendasi Penyusunan Peta RTRW Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung Bersama Kepala Dinas



TATA RUANG & ATLAS NEWSLETTER

MEDIA INFORMASI PEMETAAN TATA RUANG, DINAMIKA SUMBERDAYA DAN ATLAS



Bulan Agustus ini boleh dibilang bulan spesial dan bulan perjuangan, bukan saja karena 72 tahun lalu bangsa Indonesia tengah berjuang merebut kemerdekaan, tetapi juga bertepatan dengan masuknya bulan suci Dzulhijah. Satu bulan dimana sebagian besar umat Islam berjuang menjalankan ibadah haji dan umroh serta menyembelih kurban. Oleh karena itu bekerja, berjuang, dan beramal baik sangat dianjurkan pada bulan ini.

Bercermin pada berbagai *reward* kebaikan pada bulan ini, bukanlah hal yang kebetulan bila kami di PPTRA merasa terjadi peningkatan berbagai aktivitas dari bulan sebelumnya. Terbukti penyerapan anggaran sebesar 35% sementara kemajuan fisik hampir menyentuh angka psikologis 50%, khususnya untuk kegiatan swakelola. Frekuensi kunjungan Pemda untuk asistensi peta tata ruang semakin



meningkat, kami sudah melayani lebih dari 500 kunjungan atau sekitar 5-6 daerah/hari. Percepatan tetap kami lakukan tahun ini dengan mengintensifkan kembali kerjasama asistensi tata ruang dengan PPIDS ITB dan UGM yang diharapkan dapat mempercepat proses asistensi peta tata ruang. Demikian pula, kegiatan dalam menyiapkan produk tematik dan *e-atlas* terus dilakukan, termasuk persiapan uji keterbacaan peta taktual. Tidak kalah agresifnya adalah aktivitas penyiapan dokumen kebijakan, seperti dokumen kebijakan integrasi neraca sumberdaya alam, pemetaan tata ruang desa, dan penyajian atlas yang telah ditunggu banyak pihak.

Selain disibukkan peningkatan kinerja internal, kami juga terlibat dalam berbagai isu persoalan yang mempengaruhi kinerja dan pembangunan nasional. Mulai pada skala global seperti isu perubahan iklim dan pemetaan global, maupun persoalan nasional berupa pemenuhan target program strategis yang telah ditetapkan seperti kebijakan satu peta, moratorium lahan gambut,

RZWP3K ataupun program strategis dari PEMDA seperti penetapan Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B). Dalam konteks tersebut, pada akhirnya maka kami memandang persoalan yang terjadi diluar sana adalah lebih besar pada persoalan tematis atau ketersediaan Informasi Geospasial Tematik (IGT) daripada persoalan ketersediaan Informasi Geospasial Dasar (IGD).

Belajar dari pengalaman tersebut, kami melihat pemahaman informasi geospasial (IG) secara holistik dan integratif diperlukan sebagai pendekatan yang tepat dalam menjelaskan bisnis proses IG yang ada di BIG. Keterpaduan penyelenggaraan IGD dan IGT dalam merespon isu strategis, isu nasional, ataupun global diharapkan dapat menggambarkan peran BIG sesungguhnya dalam penyelenggaraan IG yang tidak hanya menjamin ketersediaan peta dasar tetapi berperan aktif dalam penyelenggaraan IGT yang baik dan benar. Untuk itulah kami di PPTRA berusaha mewujudkannya. Selamat Idul Adha 1438 H dan selamat berbuat kebaikan [MD, 2017].



Salah satu peran BIG yang cukup penting sesuai amanat PP No. 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang adalah bahwa seluruh peta rencana tata ruang wajib dikonsultasikan kepada BIG. Pada tahun 2016, jumlah pertemuan asistensi untuk RDTR dilakukan sebanyak 1.393 kali, sementara untuk RTRW kabupaten dan kota mencapai 111 kali pertemuan. Kondisi ini kemungkinan akan berbeda di tahun 2017 karena banyak RTRW provinsi, kabupaten, dan kota telah memasuki periode 5 tahun dan sudah masuk pada tahap peninjauan kembali. Diperkirakan jumlah pertemuan asistensi dan supervisi di BIG akan meningkat baik untuk peta RTRW maupun RDTR.

Kondisi di atas mengharuskan PPTRA berpikir kreatif membuat program-program percepatan penyelesaian peta RTRW dan RDTR. Berbagai upaya dilakukan PPTRA untuk melakukan program percepatan penyelesaian peta rencana tata ruang. Salah satunya berupa Program Kegiatan Asistensi secara Intensif. Program ini diadakan dalam rangka mengatasi kendala keterbatasan SDM daerah dalam Perpetaan RDTR, serta kendala terkait *dwelling time* penjadwalan asistensi lanjutan di BIG.

Dalam program ini, tim perpetaan dari pemerintah daerah akan didampingi secara intensif oleh tim PPTRA untuk menyelesaikan petanya. Tim daerah akan melakukan pertemuan intensif setiap hari di BIG untuk membahas dan menyelesaikan persoalan teknis perpetaannya yang diasistensi oleh Tim PPTRA. Selama kurang lebih 7 hari, seluruh permasalahan teknis perpetaan akan dibahas dan diselesaikan secara tuntas. Secara signifikan, program ini menambah jumlah daerah yang

INTENSIFKAN KEGIATAN ASISTENSI, PPTRA PERCEPAT PENYELESAIAN PETA RENCANA TATA RUANG

telah menyelesaikan proses asistensi di BIG. Program kegiatan asistensi secara intensif ini menghadapi beberapa kendala. Keterbatasan jumlah personil dibandingkan dengan jumlah daerah yang membutuhkan asistensi merupakan tantangan utama. Di samping itu, program ini juga terkendala oleh terbatasnya jumlah ruangan asistensi di PPTRA. Namun, kedua hal itu akan dapat diatasi melalui penjadwalan asistensi dengan disiplin yang tinggi.

Keberhasilan pelaksanaan program asistensi intensif membutuhkan dukungan semua pihak, baik komitmen tim asistensi PPTRA, dukungan pimpinan BIG, dan tentunya pemerintah daerah sendiri sebagai pihak yang berkepentingan terhadap penyelesaian peta rencana tata ruang. Pada tahun 2018 diharapkan kendala program intensif ini sudah teratasi, serta penganggaran kegiatan ini lebih tepat sasaran. Melalui penganggaran yang lebih terencana dan terprogram, maka pelaksanaan kegiatan ini diharapkan dapat lebih efektif dan efisien untuk menjangkau daerah-daerah yang belum menyusun peta rencana tata ruang. [Ryan Pribadi, 2017]



Pemerintah Kab Pesisir Barat, Provinsi Lampung, sebagai salah satu Daerah Otonomi Baru yang harus segera menyusun dan mengesahkan Perda RTRW Kabupaten yang telah selesai melaksanakan program asistensi intensif di BIG selama kurang lebih satu minggu



Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi :

PUSAT PEMETAAN TATA RUANG DAN ATLAS
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
Gedung F Lantai 2
Jl. Raya Jakarta-Bogor Km 46, Cibinong, Bogor

Telp. : (021) 8752062-63
Fax : (021) 8752064
Email : redaksi.pta@gmail.com
Twitter : @ptpa_big

REDAKSI:

| Penanggung Jawab : Kepala Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas | Tim Redaksi: Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas |
| Editor: Fakhruddin Mustofa , Sri Eka Wati, Roswidyatmoko D., Ellen Suryanegara, Marhensa Aditya Hadi, Chintia Dewi, Rakyani Paksi, Rochmad Budi S., I Made Dipta S. | Desain Tata Letak: Ika Rosalika |

PPTRA INTENSIFKAN PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA (PERKA) BIG MENGENAI PENYELENGGARAAN ATLAS

PPTRA yang diwakili oleh Bidang Atlas dan Pemetaan Sosial terus meningkatkan pembahasan rancangan Peraturan Kepala (Perka) BIG tentang Penyelenggaraan Atlas agar selesai pada akhir tahun ini. Melalui *Focus Group Discussion* (FGD) yang diadakan pada tanggal 14 Agustus 2017 di ruang rapat PPTRA, pembahasan Perka dilaksanakan dengan melibatkan beberapa unit teknis BIG, yaitu Bagian Hukum, Bidang Standarisasi Penyelenggaraan IG, dan Bidang Pemetaan Rupabumi Skala Kecil dan Menengah. Selain itu, kegiatan FGD ini juga melibatkan pakar di bidang atlas digital interaktif Universitas Gadjah Mada dan pakar di bidang kartografi atlas Universitas Indonesia.

Salah satu hal menarik dari rancangan peraturan ini adalah adanya pasal yang mengatur tentang pemanfaatan media *online* dalam mengumpulkan data untuk penyusunan atlas. Pemanfaatan media *online* tidak hanya dibatasi sebagai media penyajian dan penyebaran atlas saja, tetapi juga didorong supaya dapat dimanfaatkan untuk mengumpulkan data secara *real time*. Dimasukkannya pasal tersebut didorong oleh semakin meluasnya penggunaan media *online* di tengah-tengah masyarakat seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi itu sendiri.

Peraturan ini nantinya akan menjadi dasar hukum bagi BIG melalui PPTRA untuk melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan atlas di Indonesia. Atlas sebagai salah satu bentuk penyajian IG akan terus dioptimalkan fungsinya sebagai salah satu media untuk menyampaikan informasi kepada publik. Diharapkan dengan adanya Perka yang khusus mengatur tentang atlas, pemanfaatan atlas di banyak bidang dapat terus ditingkatkan dengan kualitas yang lebih baik. [Randhi Atiqi, 2017]



FGD Perka Penyelenggaraan Atlas

PPTRA BAHAS PEMETAAN DINAMIKA SUMBERDAYA KEK TANJUNG LESUNG DENGAN PARA STAKEHOLDERS



FGD KEK Tanjung Lesung

Badan Informasi Geospasial (BIG) sebagai institusi yang memiliki tugas pokok di bidang penyelenggaraan Informasi Geospasial (IG) sesuai UU No. 4/2011 berperan besar dalam kegiatan pemetaan dinamika sumberdaya wilayah. Bukan hanya pemetaan *eksisting* tetapi juga melakukan perhitungan secara kuantitatif dan kualitatif perubahan fungsi lahan kawasan pada rentang waktu tertentu sesuai kebutuhan analisisnya.

Pada tanggal 25 Juli 2017, Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas menyelenggarakan *Focus Group Discussion* (FGD) Pemetaan Dinamika Sumberdaya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung. KEK Tanjung

Lesung merupakan salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang merupakan proyek prioritas nasional. FGD ini ditujukan untuk mendapatkan informasi dan masukan yang terkait pengembangan KEK Tanjung Lesung dan rencana pengembangan infrastruktur pendukung KEK Tanjung Lesung. Dalam FGD ini, hadir beberapa *stakeholder* terkait antara lain Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi Banten dan Kabupaten Pandeglang serta Pengelola KEK Tanjung Lesung.

Kepala Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas, Mulyanto Darmawan, menjelaskan peranan BIG dalam percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional. BIG berperan membantu menyiapkan data dasar untuk mendukung setiap kegiatan strategis. BIG juga diamanahkan untuk melaksanakan kajian mengenai KEK untuk mencari seberapa besar pengaruh dari kebijakan pembangunan KEK terhadap sosial, ekonomi, dan lingkungan, melalui analisis perubahan pemanfaatan lahan. Kajian dinamika sosial yang dilakukan saat ini diharapkan dapat mengetahui seberapa besar perubahan penggunaan lahan akan berdampak terhadap perkembangan wilayah. Diharapkan hasil ini dapat dimanfaatkan pemerintah daerah untuk perencanaan pengembangan wilayah.

Plt. Kasubdit Kawasan Strategis, Kementerian PPN/Bappenas, Ika Retna Wulandary

POTRET KEGIATAN



Serah Terima Atlas Taktual

UNTUK DISABILITAS NETRA DI HARI MERDEKA

Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan RI yang ke-72, Badan Informasi Geospasial berbagi kebahagiaan dengan memberikan kado spesial 115 alat bantu untuk disabilitas netra berupa tongkat dan Atlas Taktual kepada PERTUNI (Persatuan Tunanetra Indonesia) DPC Kabupaten Bogor. Pertuni merupakan organisasi kemasyarakatan yang beranggotakan para penyandang tunanetra seluruh Indonesia. Mereka adalah bagian penting dari warga negara Indonesia yang dijamin hak-haknya.

Tongkat dan Atlas Taktual tersebut diserahkan secara langsung kepada perwakilan Pertuni Kabupaten Bogor oleh Niendyawati, Kepala Bidang Atlas dan Pemetaan Sosial BIG. Penyerahan bantuan berlangsung di sebuah mushola sederhana di Kampung Angsana, Desa Cibeber, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor. BIG berharap bantuan kedua alat tersebut dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para anggota Pertuni Kabupaten Bogor terutama untuk lebih memahami ruang sekitarnya. Perwakilan Pertuni menyatakan bahwa tongkat ini merupakan alat yang penting dan ditunggu tunggu oleh para disabilitas netra wilayah Bogor.

Atlas Taktual merupakan salah satu output dari Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas. Atlas khusus ini merupakan paduan peta timbul dengan huruf *braille* agar para penyandang disabilitas netra mendapatkan asupan tambahan informasi ruang sehingga dapat meningkatkan kecerdasan spasialnya. Tema yang terdapat pada Atlas Taktual saat ini antara lain tentang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, 34 wilayah administrasi per provinsi, dan beberapa peta tematik lainnya. Melalui atlas ini, BIG berupaya agar setiap informasi spasial yang telah dihasilkan juga dapat dinikmati oleh warga yang mempunyai keterbatasan dalam penglihatan. [Niendyawati, 2017]

memaparkan peranan pengembangan KEK dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah. Strategi pengembangan KEK dengan pengembangan potensi ekonomi, percepatan konektivitas, penguatan kemampuan SDM dan IPTEK, dan penguatan regulasi untuk mempercepat iklim investasi dan iklim usaha. Kepala Bidang Keterpaduan Infrastruktur Kawasan Strategis, Kementerian PUPR, Brawijaya, menjelaskan penyediaan infrastruktur pendukung KEK Tanjung Lesung. Pengembangan jalan tol sangat diharapkan investor untuk mendorong aksesibilitas menjadi lebih baik lagi. Kepala Bappeda Kabupaten Pandeglang, Kurnia Satriawan mendorong peninjauan kembali RTRW Kab. Pandeglang untuk dukungan pengembangan KEK Tanjung Lesung. Kab. Pandeglang merupakan daerah yang relatif tertinggal di Provinsi Banten sehingga membutuhkan investasi untuk mendorong perkembangan wilayah. Joyce Irmayanti, selaku Administrator KEK Tanjung Lesung menjelaskan progres dan kendala pengembangan KEK Tanjung Lesung.

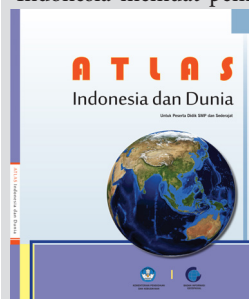
Pemerintah Kab. Pandeglang berharap kegiatan ini dapat memberikan masukan dalam proses perencanaan pengembangan wilayah. Perencanaan membutuhkan dukungan data yang berkualitas termasuk informasi geospasial yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. [Roswidyatmoko, Dwihatmojo, 2017]

PPTRA AKAN SELESAIKAN ATLAS PENDIDIKAN SMP

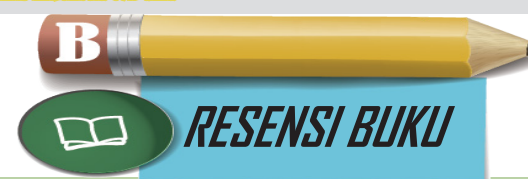
Upaya untuk meningkatkan kecerdasan spasial peserta didik tingkat SMP sekaligus mendukung Kurikulum 2013 terus menerus dilakukan oleh Direktorat Pembinaan SMP, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Direktorat Pembinaan SMP memandang atlas sebagai media peningkatan kecerdasan spasial sekaligus pendukung pembelajaran peserta didik SMP karena berisi informasi tematik berbasis ruang. Sebagai catatan, salah satu bagian penting dalam Kurikulum 2013 adalah pembelajaran tematik integratif.

Bak gayung bersambut, upaya dari direktorat tersebut mendapat dukungan penuh dari Badan Informasi Geospasial (BIG). BIG melalui Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas bermitra dengan Direktorat SMP menyusun dua atlas untuk peserta didik SMP bertema Atlas Wilayah Indonesia dan Dunia serta Atlas Sejarah Indonesia. Untuk menyelesaikan dua atlas tersebut telah dilaksanakan serangkaian pertemuan teknis mulai bulan Maret di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, hingga Agustus 2017 di Yogyakarta. Rencana penyelesaian *draft* final akan dilakukan pada bulan September 2017 dan akan dilanjutkan dengan uji keterbacaan dengan melibatkan MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran).

Atlas Wilayah Indonesia dan Dunia berisi informasi geospasial tematik terintegrasi mengenai wilayah NKRI, administrasi 34 provinsi, pengenalan pulau-pulau strategis terkait kedaulatan, serta pengenalan sumberdaya alam dan kependudukan. Atlas Sejarah Indonesia memuat pembelajaran sejarah yang menekankan pada aspek ruang sebuah peristiwa sejarah berlangsung. Konten dari dua atlas tersebut disesuaikan dengan tingkat kemampuan dan buku pelajaran SMP sehingga diharapkan mudah dicerna dan mempercepat peserta didik menyerap ilmu dari mata pelajaran terkait. [Fakhrudin Mustofa, 2017]



ATLAS Indonesia & Dunia



REFORMASI PERKOTAAN Mencegah Wilayah Urban Menjadi Human Zoo

“Jangan kita biarkan kota-kota kita menjadi rusak, metropolis kita menjadi miseropolis, hanya karena kita biarkan *The Big Boys* (penguasa lamalim dan penguasa hitam) merajalela membangun kota dengan seenaknya”. Kalimat yang ditulis dalam pengantar buku sekiranya dapat menjadi gambaran kritikan-kritikan pedas menggambarkan kualitas dalam buku ini.

Pada bagian awal, buku ini menyajikan pembahasan mengenai masalah laten perkotaan dengan sub-sub pembahasan yang menarik, seperti:

SURVEYOR PPTRA LAKUKAN VERIFIKASI CITRA SATELIT DI KAWASAN BREGASMALANG (BREBES, TEGAL, SLAWI, PEMALANG)

Informasi geospasial dinamika sumberdaya menjadi salah satu bagian penting bagi perencanaan pembangunan wilayah. Seiring semakin besarnya kebutuhan informasi geospasial dasar dan tematik tentang dinamika sumberdaya alam serta sumberdaya strategis, maka diperlukan suatu pengelolaan dan penyampaian data dan informasi spasial demi memenuhi tuntutan kebutuhan pengguna informasi spasial dalam lingkup sinergi tata kelola pembangunan nasional dan daerah.

Maksud kegiatan pemetaan neraca spasial sumberdaya alam lingkup kab/kota ini untuk memperoleh dataset Informasi Geospasial Dasar (IGD) dan Informasi Geospasial Tematik (IGT) sumberdaya terpadu pada skala kabupaten/kota. Aspek tematik sumberdaya yang menjadi lingkup kajian adalah sumberdaya alam (hutan dan lahan) dan sumberdaya strategis (demografi, sosial-ekonomi, dan infrastruktur).

Untuk mendukung kegiatan tersebut, telah dilaksanakan survei lapangan di kawasan Bregasmalang pada tanggal 24-28 Juli 2017. Survei ini melibatkan tiga orang staf teknis Bidang Pemetaan Dinamika Sumberdaya BIG serta empat orang perwakilan konsultan. Dalam pelaksanaannya, survei dibagi menjadi dua tim dengan pertimbangan sebaran titik pengamatan dan waktu yang tersedia.

Survei lapangan ini bertujuan untuk melakukan verifikasi hasil interpretasi citra satelit sumberdaya hutan dan lahan, khususnya penggunaan lahan eksisting. Dalam survei lapangan juga dilaksanakan kegiatan pengumpulan data sekunder di OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait. Selain itu, tim juga melakukan wawancara dengan masyarakat disekitar lokasi sampel untuk mengetahui perubahan penggunaan lahan yang terjadi.

Hasil dari pengamatan lapangan menunjukkan bahwa terjadi cukup banyak perubahan penggunaan lahan di Kawasan Bregasmalang. Perubahan yang terjadi dipicu oleh dinamika perkembangan wilayah, antara lain pembangunan jalan tol Pejagan-Pemalang, kegiatan pasca pertambangan yang tidak mengindahkan aspek keberlanjutan, serta pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Hal-hal yang ditemui saat survei lapangan, data yang telah dikumpulkan, serta masukan dari OPD terkait akan dijadikan sebagai materi masukan dalam analisa data. [Sri Eka Wati, 2017]



Pengecekan Penggunaan Lahan di Wilayah Perbatasan

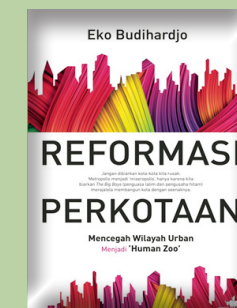


Sebaran Titik Pengamatan Lapangan

Kota Kita="Human Zoo?", Kota-kota yang Terluka, Metropolis atau Miseropolis?, "Sindrom Sumpit" Perkotaan, dan Surga Perkotaan yang terancam.

Kemudian pada bab-bab selanjutnya diuraikan mengenai demokratisasi perkotaan, kekurangpekaan terhadap keseimbangan ekologis, keunikan dan jati diri kota, serta perumahan dan otonomi daerah. Dari sekian hal pembahasan yang disampaikan, Prof. Eko Budihardjo menekankan bahwa seharusnya kota-kota kita dapat benar-benar berfungsi sebagai magnet harapan kedamaian, kebahagiaan, dan kesejahteraan, bukan menjadi sumber malapetaka dan penderitaan warganya.

Melalui uraian lugas dan bahasa kritis yang membangun, buku ini patut menjadi referensi bagi para penentu kebijakan perkotaan, wakil rakyat, arsitek, planolog, serta dosen dan mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu. [Rochmad, 2017]



Judul Buku : REFORMASI PERKOTAAN Mencegah Wilayah Urban Menjadi Human Zoo
Penyusun : Prof. Ir. Eko Budihardjo, M.Sc.
Penerbit : Kompas, 2014